

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)  
DALAM PEMBANGUNAN NAGARI SUNGAI PUA**

**TESIS**

Oleh :

**WEDY NASRUL**

**0821202029**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALASS  
2010**

## **PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PEMBANGUNAN NAGARI SUNGAI PUA**

Oleh: Wedy Nasrul

(Dibawah bimbingan Dr.Ir.Endry Martius,M.Sc dan Prof.Dr.Melinda Noer,M.Sc)

### **RINGKASAN**

Diberlakukannya Perda Sumbar 2/2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari adalah sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dan efektif di daerah. Peran masyarakat dan lembaga-lembaga akan dapat dikembangkan, tidak hanya sebatas penerima manfaat, tetapi secara aktif terlibat langsung dalam program-program pembangunan. Tantangan terbesar adalah terjadi perubahan fungsi lembaga-lembaga dan pergeseran nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Lembaga adat semisal KAN bersama Niniak Mamak yang telah lama berfungsi dan berperan dalam pemerintahan dan pembangunan nagari digantikan fungsinya oleh lembaga-lembaga baru. KAN saat ini hanya berfungsi sebagai lembaga adat yang menyelesaikan masalah sako dan pusako. Kondisi KAN saat ini ditengarai juga akan berdampak terhadap peran KAN dalam pembangunan nagari.

Tujuan pokok dari penelitian ini adalah mempelajari peran KAN dalam pembangunan nagari. Secara spesifik tujuannya adalah mendeskripsikan peran KAN dalam pembangunan nagari dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran KAN dalam pembangunan nagari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu pengamatan langsung atau observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akibat intervensi pemerintah terhadap pemerintahan nagari dari waktu ke waktu secara tidak langsung membuat peran KAN semakin berkurang dalam pembangunan nagari. Terdapat dua bentuk

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Upaya pembangunan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program. Upaya-upaya itu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat pedesaan. Namun, masih banyak wilayah pedesaan yang belum berkembang secepat wilayah lainnya.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat kawasan pedesaan yang masih dominan (82% wilayah Indonesia adalah pedesaan) dan sekitar 50% penduduk Indonesia masih tinggal di kawasan pedesaan. Pada tahun 2008 terdapat 67.245 desa dan hanya 7.893 kelurahan (BPS, 2008). Arti penting pembangunan pedesaan adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum dalam kawasan pedesaan, dan kepentingan umum dalam kawasan pedesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri 51/2007 tentang Pembangunan Pedesaan berbasis Masyarakat).

Dalam pembangunan desa, hal yang perlu diketahui, dipahami dan diperhatikan adalah berbagai kekhususan yang ada dalam masyarakat pedesaan. Tanpa memperhatikan adanya kekhususan tersebut mungkin program pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Kekhususan pedesaan yang dimaksud antara lain adalah bahwa masyarakat desa

relatif sangat kuat keterikatannya pada nilai-nilai lama seperti budaya/adat istiadat maupun agama. Nilai-nilai lama atau biasa disebut dengan budaya tradisional itu sendiri menurut Dove (1985) sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat pada tempat di mana budaya tradisional tersebut melekat.

Kelembagaan lokal adalah merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan desa. Tanpa adanya kelembagaan lokal, ditambah dengan birokrasi serta partisipan, infra struktur tidak akan dapat dibangun atau dipertahankan. Jasa pelayanan masyarakat tidak dapat dilakukan sementara itu teknologi yang sesuai tidak akan dapat ditempatkan secara maksimal dan pemerintah tidak akan dapat memelihara atau mempertahankan arus informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian kelembagaan lokal adalah merupakan faktor dominan, terutama dalam menggerakkan partisipasi (Esman dan Uphoff, 1988). Kelembagaan lokal tradisional mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh institusi formal yang ada, yaitu berupa kedekatannya dengan masyarakat tingkat bawah, dan lebih peka dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaannya sangat menentukan sekali akan keberhasilan sebuah pembangunan (Imron *et al* 2002).

Lebih lanjut Hubungan antara kelembagaan tradisional, partisipasi, dan pembangunan desa dengan jelas dapat kita lihat dari catatan Darling (1977) dalam Imron *et al* (2002) bahwa faktor penduduk asli adalah penentu utama pembangunan. Apa yang dikemukakan Steive (1977) dalam Imron *et al* (2002) dalam pelaksanaan program Minimum Package Project (MPP) oleh Bank Dunia, USAID dan SIDA di Etopia yang lebih memilih menciptakan organisasi baru dari pada memanfaatkan organisasi tradisional yang ada yang akhirnya mengalami

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

#### 1. Peran KAN dalam pembangunan Nagari Sungai Pua.

Interfensi pemerintah terhadap pemerintahan nagari dari waktu ke waktu secara tidak langsung membuat peran KAN semakin berkurang dalam pembangunan nagari. Fungsi KAN secara normatif dalam pembangunan nagari adalah sebagai mitra kerja pemerintahan nagari. Sebagai lembaga adat tugas KAN hanya dalam penyelesaian sako, pusako dan sangsako. Kebijakan pembangunan di Nagari Sungai Pua dirumuskan oleh Walinagari bersama BAMUS sedangkan penyelenggara pembangunan dilaksanakan oleh LPMN. Seperti diungkap Ardi (2004) bahwa lembaga masyarakat adat seperti KAN adalah mitra kerja dan bukan pelaku pemerintahan/pembangunan itu sendiri.

Terdapat 2 (dua) bentuk peran KAN dalam pembangunan Nagari Sungai Pua; a) Peran yang langsung dilakukan oleh lembaga KAN sesuai fungsinya dalam pembangunan nagari; b) Peran tidak langsung yang dilakukan oleh KAN melalui *Niniak Mamak*.

Peran langsung KAN tidak sepenuhnya ada dalam kegiatan/program, tetapi terdapat pada seluruh tahapan pembangunan nagari. Peran yang sangat dominan dilakukan KAN pada tahap perencanaan dan koordinasi pembangunan Nagari Sungai Pua. Peran tidak langsung dilakukan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. dan Hikmat, H. 2001. *Participatory Research Appraisal: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Amir, M.S. 2004. *Pemerintahan Nagari dan Masyarakat Adat Suatu Tinjauan Kritis*. Minang Kabau yang Gelisah. CV. Lubuk Agung Bandung.
- Anwar. 2006. *Peranan Kelembagaan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal*. Makalah. Insititut Pertanian Bogor, Bogor.
- Antholt, C. H. 2001. *Agricultural Extension in the Twenty-First Century dalam Eicher dan Staatz (eds). 2001. International Agricultural Development*. Third Edition. Johns Hopkins.
- Asnawi, S. 1999. *Perkembangan Pemikiran Pembangunan Wilayah Pedesaan*. Padang. PSI-SDALP UNAND
- Ardi, N. 2004. *Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Adat Minang Kabau*. Minang Kabau yang Gelisah. CV. Lubuk Agung Bandung.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Data Strategis BPS*. BPS. Jakarta
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga.
- Buletin Sungai Puar. 1986. *Pemerintahan Nagari Sungai Pua*.
- Casley, D.J. 1991. *Pemantauan dan Evaluasi Proyek Pertanian*. UI-PRESS
- Chairiyah, Sri Zul. 2008. *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*. KP3SB.
- Chatra, E. 1999. *Adat Selingkar Desa*. Padang. Fisip Unand dan SPS Budaya Unans.
- Djogo, T, Sunaryo, Suharjito, D dan Sirait, M. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*, World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Djohan, D. 1990. *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*. Bumiaksara. Jakarta.
- Dove, M. R. 1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Effendi, N. 2004. *Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Adat : Suatu Pemikiran*. Minang Kabau yang Gelisah. CV. Lubuk Agung Bandung.
- Elfindri, dkk. 2008. *Strategi Sukses Membangun Dacrah*. Gorga Media
- Elizabeth, R. 2008. *Diagnosa Kemarjinalan Kelembagaan Lokal untuk Menunjang Perekonomian Rakyat di Pedesaan*. Jurnal Soca. Univ. Udayana Volume 8 1 Februari 2008